

Budaya Kekerasan Dan Konflik Etnisitas di Kalimantan Barat Periode 1966-2000

Kristianus

Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak,
Email: kristianusatok@gmail.com

Abstrak

Latar Belakang penelitian ini adalah tingginya fenomena budaya kekerasan di Kalimantan Barat pada rentang tahun 1966-2000. Penulis ingin mempelajari kaitan fenomena tersebut dikaitkan peristiwa politik yang terjadi baik di level Nasional Indonesia maupun di level daerah Kalimantan Barat. Penulis menggunakan metode kepustakaan dalam mengumpulkan data yang diperlukan, data tersebut kemudian diolah dengan teori budaya dan konflik. Setelah melakukan penelitian selama tiga bulan, penulis akhirnya berkesimpulan bahwa fenomena budaya kekerasan di Kalimantan Barat berasal dari kepentingan politik praktis yang dilakukan oleh elit- elit etnis untuk memperoleh kekuasaan. Fenomena tersebut juga dipengaruhi oleh peristiwa politik yang terjadi di level Nasional. Pada bagian lain, penguatan politik identitas juga tidak dapat dilepaskan dari adanya peran institusi-institusi etnisitas. Institusi seperti MAD dan MABM telah menimbulkan rasa kebanggaan etnik. Kadangkala rasa bangga tersebut berlebihan dan bahkan mengarah militansi etnik (etnosentrisme). Kebetulan pula lembaga-lembaga tersebut berdiri sebelum terjadinya kerusuhan etnik bersekala besar dan masif. Oleh karena itu jangan heran apabila kemudian dikaitkan dengan konsolidasi etnis . Berbagai pihak kemudian melihat institusi-institusi etnisitas sangat memperkuat Politik Identitas etnik di Kalimantan Barat.

Kata kunci: *Budaya kekerasan, Dayak, Melayu, Politik Identitas, konflik etnik*

Abstract

The background of this research is the high phenomenon of cultural violence in West Kalimantan in the period 1966-2000. The author wants to study the relationship between these phenomena and political events that occurred both at the Indonesian National level and at the regional level in West Kalimantan. The author uses the library method in collecting the necessary data, the data is then processed with the theory of culture and conflict. After conducting research for three months, the author finally concludes that the phenomenon of culture of violence in West Kalimantan stems from practical political interests carried out by ethnic elites to gain power. This phenomenon is also influenced by political events that occur at the national level. On the other hand, the strengthening of identity politics cannot be separated from the role of ethnic institutions. Institutions such as MAD (Majelis Adat Dayak) and MABM (Majelis Adat Budaya Melayu) have created a sense of ethnic pride. Sometimes the pride is excessive and even leads to ethnic militancy (ethnocentrism). Incidentally, these institutions were established before the occurrence of large-scale and massive ethnic riots. Therefore, do not be surprised if it is later associated with ethnic consolidation. Various parties then saw that ethnicity institutions greatly strengthened ethnic identity politics in West Kalimantan.

Keywords: *Cultural Violence, Dayak, Melayu, Politic Identity, Conflict Ethnic*

Submitted: 29 Oktober 2021

Revised: 20 Maret 2022

Accepted: 25 Maret 2022

PENDAHULUAN

Periode tahun 1966-2000 adalah periode yang paling sering terjadi budaya kekerasan atas nama etnis di Kalimantan Barat. Kondisi ini diperparah oleh Orde Reformasi dan Otonomi Daerah yang dijalankan sejak 1999, dimana setiap kepala Daerah dipilih secara langsung melalui

PILKADA. Model pemilihan kepala daerah yang demikian telah menguatkan kembali masalah identitas etnik dan budaya di Indonesia(1), tak terkecuali di Propinsi Kalimantan Barat. Identitas etnik menjadi perdebatan publik karena isu ini bersentuhan langsung dengan politik kekuasaan(2).

Di Propinsi Kalimantan Barat identitas etnik bahkan telah merubah administrasi pemerintahan(3). Sampai akhir pemerintahan rezim Orde Baru yaitu tahun 1998, propinsi ini hanya terdiri dari 7 kabupaten/ pemerintahan kota. Sepuluh tahun kemudian yaitu tahun 2009 jumlah kabupaten telah menjadi 14 kabupaten. Peningkatan ini cukup signifikan. Sekarang ini sedang menjadi perdebatan publik tentang pembentukan Propinsi Baru di Kalimantan Barat. Kelak propinsi ini akan dinamakan Propinsi Kapuas Raya, wilayah propinsi Kapuas Raya ini meliputi kabupaten – kabupaten di pedalaman seperti Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, dan Kapuas Hulu yang nota bene kawasan yang didominasi oleh Etnik Dayak.

Setiap kelompok seakan memiliki teritori etnik tersendiri. Sebagai akibat kebijakan pemekaran wilayah, Kabupaten Sambas dan Kabupaten Pontianak menjadi teritori Melayu, Bengkayang & Landak menjadi teritori Dayak. Dan sebagai akibat kekerasan etnik sebelumnya, Cina dan Madura cenderung menetap di sekitar perkotaan. Bersama Melayu, ketiga kelompok etnik tersebut menjadi mayoritas di beberapa lokasi kota perdagangan penting di Kalbar: Pontianak dan Singkawang(4). Daerah yang disebut terakhir ini karena telah diakui statusnya oleh pemerintah sebagai kota otonom, terkepas dari Sambas dan Bengkayang, dapat dikatakan seakan sebagai teritori Cina. Bukan hanya dari aspek demografis, melainkan juga simbolis.

Di Kalimantan Barat, pertikaian yang bernuansa Suku-Agama-Ras (SARA) lebih-lebih menyangkut hubungan antar suku bangsa, bukan hal baru. Jejaknya biasa diruntut pada 1967, saat terjadi anti Tionghoa di kawasan ini(5). Bahkan lebih jauh lagi, Menurut Siahaan dalam Kristianus(4) , yakni massa pertikaian antar warga Tionghoa, Melayu dan Dayak . Pengamatan cermat menunjukkan, sejak itu di wilayah ini secara historis banyak diwarnai oleh aksi dan pertikaian rasialis. Warna-warna tadi tampak menjadi gejala, yang selalu berulang dengan interval waktu lebih pendek lagi. Pemicu pertikaian sebenarnya kerap kali sepele, misalnya menyabit rumput di

tanah orang lain (kasus1997), perkelahian kecil (1982), soal mengganggu istri orang (1992) atau hanya karena persenggolan (1994), perebutan perempuan (1996) dan penagihan hutang, satu versi, (1999)(4). Namun, persoalan sepele itu kemudian meluas ke wilayah rawan, hingga menimbulkan kejengkelan, khususnya antara suku-suku Dayak dan Madura, dan lainnya antara suku Melayu dan suku Madura. Pertikaian terakhir terjadi antara suku-suku Melayu dan Madura terjadi pada february-april 1999 dan oktober 2000 yang tidak sedikit menimbulkan korban jiwa dan benda di kedua belah pihak. Berbeda terhadap suku Madura, suku Dayak kini menjalin hubungan relatif rukun, baik dengan suku-suku, Jawa, Sunda, Tionghoa maupun Bugis(6).

Pada masa sebelum dan selama masa kolonial, Kalbar tercabik-cabik dalam peperangan antar suku Dayak atau populer dipanggil 'Kayau'. Ketika itu orang Dayak baru mengenal politik yang sangat terbatas, mereka hanya berpikir untuk menghabisi orang lain yang masuk dan mencari hasil hutan di wilayah mereka karena dianggap musuh. Atas prakarsa Kolonial belanda, orang Dayak kemudian berhasil menciptakan perdamaian di antara mereka pada konggres di Tumbang Anoi pada tahun 1894(7).

Ketika Kolonial Belanda tiba di Kalimantan Barat, daerah ini sudah merupakan daerah yang terdiri dari banyak kesultanan(8). Kendati saling bersaing, semua sultan adalah Melayu atau Dayak yang sudah menjadi Islam dan memperoleh dukungan dari pemerintah Belanda & Jepang(9). Dayak yang kemudian menjadi rakyat biasa menjadi subyek kekuasaan Melayu. Cina merupakan kelompok etnik yang walaupun juga berada dalam kekuasaan Melayu, namun mereka berusaha mengembangkan otonomi tersendiri & relatif eksklusif(10).

Konfigurasi sosial semacam itu terus bertahan hingga beberapa peristiwa penting terjadi di penghujung masa kolonialisme dan masa kemerdekaan. Pemerintah Belanda & misionaris memberikan kesempatan pendidikan yang besar,

dan secara sadar atau tidak, ikut membentuk identitas etnik kepada Dayak(11).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan, dimana penulis mengumpulkan berbagai dokumen yang terkait topik penelitian. Penulis mengikuti prinsip dalam studi kepustakaan(12) dengan membaca sejumlah referensi yang rata-rata berupa tulisan (baik buku, artikel, jurnal, dan lain-lain) yang nantinya dijadikan sebagai sumber data untuk tulisan yang disusun. Data yang ada pada dokumen-dokumen tersebut dikumpulkan berdasarkan pertanyaan penelitian(13). Setiap data di cek silang berdasarkan informasi pembanding, terutama tulisan tulisan yang berkenaan dengan pertanyaan penelitian. Sebagai diketahui bahwa studi pustaka merupakan kegiatan mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan data terkait masalah yang diteliti. studi pustaka menurut Sugiyono adalah kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti(14).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Politik Identitas pada Periode Pemerintahan Orde Lama (1945-1966)

Pada Pemilu tahun 1955 , Partai Persatuan Dayak menang mayoritas di Kalimantan Barat(15). Oleh itu Ketua partai itu JC Oevang Oeray seorang Dayak Kayan dinobatkan sebagai Gubernur Kalimantan Barat. Selain itu etnik Dayak juga menduduki posisi 4 daripada 7 kabupaten di Kalimantan Barat ketika itu. Etnik Dayak berikutan Gubernur dan Bupati orang Dayak pun akhirnya menguasai posisi sebagai pegawai-pegawai pemerintahan lainnya. Yang menarik bahwa pada Periode ini Gubernur Oevang Oerai banyak memberi beasiswa kepada pemuda/i Melayu untuk melanjutkan sekolah di Jawa(4).

Dapat dikatakan bahwa pada era Orde Lama, etnik Dayak berada pada posisi menguasai

peranan strategis pada pemerintahan dan politik di Kalimantan Barat. Sedangkan etnik Melayu pada masa ini mengalami krisis kepemimpinan.

Periode Pemerintahan Orde baru (1967-1998)

. Marginalisasi etnik Dayak

Etnik Dayak mengalami marginalisasi pada masa ini, rumah-rumah panjang dihancurkan dengan dalih sanitasi jelek. Budaya Dayak hancur akibat kebijakan ini(16). Perlakuan yang tidak adil ini membuat, karakter-karakter kekerasan dalam budaya mengayau seolah tumbuh kembali. Padahal budaya ini sudah lebih dari 100 tahun telah hilang.

Pada masa pemerintahan Orde Baru, kelompok etnik Dayak justru mengalami penjajahan dari negeri sendiri. Hak dan kedaulatan mereka dipasung dengan perundang-undangan, kawasan adat mereka sering di serobot dengan tanpa kompromi (alasan tanah negara) dan yang paling tragis dan sangat menghancurkan Dayak sebagai masyarakat adat adalah ketika diberlakukannya UU No 5 tahun 1974 dan 1979 tentang Pemerintahan Desa, dimana segala sesuatu harus seragam. Kedua UU ini adalah bentuk pengingkaran dan penghianatan terhadap cita-cita para pendiri Republik Indonesia yang mencantumkan falsafah negara Bhinneka Tunggal Ika. Falsafah ini dilanggar dan bahkan diinjak-injak dengan memakai simbol pembangunan. Kebijakan penyeragaman yang dilakukan pemerintahan ORBA lebih dikenali dengan istilah “Jawanisasi”. Rakyat tabu membicarakan suku, agama dan ras (SARA). Model pemerintahan lokal dihapus dan digantikan dengan sistem di pulau Jawa.

Pada masa ini kebijakan politik berupa transmigrasi juga dilakukan secara besar-besaran(17). Kebijakan transmigrasi ini telah menimbulkan kepanikan pada suku-suku asal, terutama Dayak. Karena sebagian besar lokasi transmigrasi di tanah-tanah adat etnik, Dayak. Mereka tidak senang suku-suku luar mencaplok teritorinya.

. Fenomena Budaya Kekerasan

Pada masa transisi peralihan kuasa Orde Lama kepada Orde Baru yaitu tahun 1966-67

terjadi kerusuhan besar , yang melibatkan identitas etnik yaitu antara Dayak dengan Cina. Kerusuhan ini terasa ganjil karena sebenarnya kedua etnik ini memiliki hubungan yang erat. Pada tahun terakhir pemerintahannya Gubernur Oevang Oerai ditekan agar mengusir etnik China daripada kawasan pedalaman Kalimantan Barat. Pengusiran ini berkaitan dengan penumpasan Partai Komunis Indonesia dan PGRS-Paraku(18). Dalam posisi kuasa yang lemah, Gubernur Oevang Oerai akhirnya terpaksa mengikut kebijakan dari pusat, yaitu dengan memobilisir etnik Dayak untuk mengusir etnik China dari kawasan pedalaman.. Jamie Davidson , menyebut pembantaian 1967 sebagai “membangunkan kembali budaya kekerasan” di Kalimantan Barat(19).

Kedatangan banyak etnik lain dari pelbagai kawasan Indonesia ke Kalimantan Barat telah menimbulkan ketakutan pada etnik setempat yaitu Dayak. Dari sekian banyak suku luar yang datang, suku Madura adalah yang paling berani(20) . Faktor “menantang” inilah yang kemudian menyebabkan kedua suku hidup dalam keadaan “siap berperang” selalu. Sedikit saja ada konflik antar keduanya, tidak terlalu sulit untuk menjadi besar (kerusuhan). Akibat berbagai perlakuan diskriminatif yang dialami kelompok etnis Dayak pada Masa Orde Baru, maka mereka sangat mudah emosi. Mudah panas. Hanya dipicu oleh persoalan yang sangat sepele, dengan mudah membangkitkan kemarahan komunal.

Pada tahun 1968 , Etnik Dayak rusuhan dengan Madura. kerusuhan pada masa itu dipicu oleh pembunuhan terhadap Sani (Camat Sungai Pinyuh yang orang Dayak Kanayatn) oleh Sukri warga Madura. Pembunuhan ini dilatarbelakangi oleh penolakan Camat tersebut untuk melayani pengurusan surat keterangan tanah pada hari minggu karena Camat itu ingin ke Gereja. Kematian Sani kemudian tersebar ke kampung-kampung Dayak. Tanggapan spontan kemudian tak dapat dihindari , etnik Dayak yang masih diselimuti suasana hati ”pengusiran etnik cina” kemudian membakar dan membunuh enik Madura di beberapa kecamatan seperti Mempawah Hulu,

Menjalin, Toho, Anjungan dan kawasan-kawasan pedalaman lainnya.

Dalam bentuk yang ringkas, uraian di atas kemudian penulis kemukakan juga dalam bentuk tabel, seperti pada pada tabel di bawah ini.

Tabel 1
BUDAYA KEKERASAN YANG MELIBATKAN ETNIK DAYAK DENGAN PERISTIWA POLITIK

N o.	W a kt u	Lokasi	Keterangan
1.	1966-1967	Kabupaten Sambas, Pontiana k, Sanggau, Sintang, Ketapang	Rusuhan etnik Dayak dengan Cina. Seluruh etnik Cina diusir daripada kampung-kampung pedalaman Kalimantan Barat. Rusuhan ini dianjurkan oleh Militer yang berselindung dengan penumpasan PKI dan PGRS-Paraku. Pada masa ini berlaku penggulingan Gubernur Oevang Oerai dan 4 orang Bupati dari etnik Dayak
2.	1968	Anjungan, Kabupaten Pontianak	Rusuhan enik Dayak dengan Madura, Konflik dipicu oleh pembunuhan terhadap Sani (Camat Sungai Pinyuh yang orang Dayak Kanayatn) oleh Sukri warga Madura. Pembunuhan ini dilatarbelakangi oleh penolakan Camat tersebut untuk melayani pengurusan surat keterangan tanah pada hari minggu karena Camat itu ingin ke Gereja.
3.	1967	Di Sungai pinyuh, Kabupaten Pontianak	Rusuhan etnik Dayak dengan Madura, Konflik dipacu oleh terbunuhnya seorang Dayak Kanayatn, yaitu Cangkeh asal Liongkong/Sukaramai yang dilakukan oleh seorang warga Madura yang mengambil rumput di tanah milik korban. Peristiwa ini berlaku sebelum Pemilihan Umum tahun 1977
4.	1967	Di Singkawang, kabupaten Sambas	Dipacu oleh terbunuhnya seorang Dayak Kanayatn anggota Polri bernama Robert Lanceng oleh Maskat seorang warga Madura. Sebelum kejadian, korban menegur adik perempuannya agar jangan pergi keluar rumah malam hari bersama pemuda Madura tersebut. Peristiwa ini pada tahun yang sama dengan Pemilihan Umum dan sebelum pemilihan Gubernur
5.	1967	Kabupaten Sambas	Konflik dipicu oleh pertengkaran masalah hutang yang menyebabkan Sakep (seorang Dayak Kanayatn) diserang oleh tiga orang Madura. Dua Dayak Kanayatn lainnya hampir terbunuh.

6.	1 9 8 2	Pak Kucing, Kabupaten Sambas	Konflik diplcu oleh pembunuhan terhadap Sidik seorang warga Dayak Kanayatn oleh Aswandi seorang warga Madura karena korban menegur Aswandi yang sebelum mengambil rumput disawah miliknya tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Pada tahun ini juga terjadi Pemilihan Umum.
7.	1 9 8 3	Sungai Enau, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Pontianak	Konflik diplcu oleh Dul Arif seorang warga Madura yang melakukan pembunuhan atas seorang warga Dayak Kanayatn yang bernama Djaelani karena masalah tanah. Peristiwa berlaku selepas Pemilihan umum dan menjelang pemilihan Gubenur
8.	1 9 9 2	Pak Kucing, Kabupaten Sambas	Konflik diplcu oleh pemerkosaan terhadap anak Sidik (yang terbunuh ada tahun 1982) yang dilakukan oleh seorang warga Madura. Peristiwa berlaku pada masa yang sama dengan Pemilihan Umum.
9.	1 9 9 3	Kotamadya Pontianak	Konflik massal diplcu oleh perkelahian antar pemuda Dayak dengan pemuda Madura yang mengakibatkan perusakan dan pembakaran terhadap Gereja Paroki Maria Ratu Pencinta Damai dan Persekolahan Kristen Abdi Agape. Peristiwa berlaku setelah Pemilihan Umum dan menjelang Pemilihan Gubernur.
10.	1 9 4	Tubang Titi, Kabupaten Ketapang	Konflik diplcu oleh penusukan seorang Dayak oleh seorang Madura yang sedang bekerja diproyek pembangunan jalan. Pada masa ini berlaku emilihan Bupati Sinang. Calon Dayak di kalahkan etnik Melayu oleh sebab adanya pembangkang.
11.	2 8 1 9 9 6	Sanggau Ledo, Kabupaten Sambas	Konflik diplcu oleh tertusuknya Yakundus dan Akim, dua pemuda Dayak Kanayatn di Sanggau Ledo oleh pemuda Madura, yaitu Bakri dan empat temannya.
12.	1 5 Ja n - 2 8 F e b	Kabupaten Sambas, Kabupaten Pontianak, Kabupaten Sanggau	Konflik Dayak-Madura di daerah kabupaten Sambas mulai mereda, tetapi kemudian meledak lagi setelah terjadi penyerangan terhadap kompleks persekolahan SLTP-SMU Asisi di Siantan. Dalam peristiwa ini dua perempuan Dayak Jangkang (Sanggau Kapuas) dan Dayak Menyuke (Landak) luka-luka. Kemudian, terbunuhnya seorang warga Dayak Kanayatn asal Tebas-Sambas, yakni

1 Kapuas, nyangkot oleh sekelompok warga Madura
9 dan di Peniraman. Pada masa ini terjadi
9 Kotamad Pemilu, Pemilihan Bupati Sanggau dan
7 ya pemilihan Gubernur. Selain daripada itu
Pontiana keadaan politik Nasional di Jakarta juga
k sedang memanas.

1 !
3 9
9
9

Sumber : diolah dari berbagai data yang dikumpulkan.

Dari uraian di atas, penulis akhirnya membuat kesimpulan bahwa berbagai konflik etnik yang kemudian menjadi kerusuhan etnik di Kalimantan Barat , akar penyebabnya bukan karena perbedaan budaya, tetapi sungguh jelas perkara ini memiliki keterkaitan dengan aktivitas politik .

Adanya temuan yang penulis uraikan di atas, penulis kemudian menolak hasil dari analisis para sarjana yang mengatakan bahwa konflik antara orang Dayak dengan orang Madura di Kalimantan Barat disebabkan oleh benturan budaya dan praduga-praduga yang didasarkan pada stereotif yang negatif. Dari data yang penulis paparkan dalam tabel di atas, tampak jelas bahwa akar konflik dan kerusuhan adalah persaingan politik yang membawa serta identitas etnik, adapun faktor budaya dan stereotif hanyalah faktor yang dipergunakan pihak berkepentingan untuk mengatakan bahwa pilihan mereka melakukan kerusuhan boleh diterima/ rasional. Para penganalisis pun ketika itu tidak berani mengaitkan peristiwa kerusuhan dengan politik karena pada masa itu sedang berlaku pemerintahan Orde Baru yang dipenuhi manipulasi informasi dan ketakutan intelektual. Para penganalisis pada masa itu mungkin takut

ditangkap jika menyampaikan hasil analisis yang bertentangan dengan keinginan orde Baru(21).

Yang menarik bahwa Etnik Melayu tidak mau melibatkan diri dalam konflik Dayak -Madura ini. Bahkan mereka tidak melakukan rusuhan dengan etnik Madura, walaupun sebenarnya ada anggota etnik mereka juga yang bersengketa dengan etnik Madura. Dalam semua bentuk tercatat enam belas (16) kali terjadi konflik etnik Melayu Sambas dengan Madura tersebut(22).

Fenomena Lembaga Etnisitas

Pemerintahan Orde baru adalah masa suram bagi orang Dayak, tetapi dalam masa itu komunikasi dan konsolidasi antar tokoh-tokoh Dayak terpelajar meningkat pesat. Pada masa ini lahirlah organisasi Majelis Adat Dayak (MAD), organisasi ini merupakan organisasi keetnisan yang pertama dibentuk di Kalimantan Barat. Majelis Adat Dayak (MAD) berdiri pada 1994 oleh sejumlah Tokoh Politik Dayak di kota Pontianak. Mulanya kehadiran institusi ini sangat erat kaitannya dengan kepentingan para tokoh tersebut dengan Golongan karya sebuah partai dominan di era tersebut.

Melayu awalnya tidak mempedulikan gerakan politik etnik Dayak. Namun setelah kekerasan etnik Dayak versus Madura pada 1997 berakhir yang kemudian membuat Dayak semakin asertif dan konfiden dalam memperjuangkan kepentingannya, Bukan hanya dalam politik, melainkan juga sosio-kultural. Mereka yang berasal dari kumpulan etnik terakhir ini memberikan tanggapan dengan menegaskan bahwa mereka juga merupakan penduduk asli, mayoritas dan juga mengembangkan konsepsi

bahwa Dayak dan Melayu adalah saudara, dan bahwa menjadi Islam tidak berarti Dayak kehilangan identitasnya. Lebih jauh Melayu juga mengembangkan pelbagai organisasi etnik Kemelayuan dan hukum adat Melayu, seperti MAS Bayu (Majelis Adat dan Seni Budaya Melayu, Lembaga Adat dan kekerabatan Melayu (Lembayu), dan Persatuan Forum Komunikasi Pemuda Melayu (PFKPM). MAS-Bayu, sebenarnya telah pun didirikan tahun 1995 di Sambas dan Ketapang. Tetapi aktivitas lembaga ini tidak menonjol. Tahun 1999 pula didirikan Lembaga Adat dan Kekerabatan Melayu (Lembayu) dan PERMAK (Persatuan Melayu Kalimantan Barat), basis kedua institusi ini ialah Keraton Kadriah Pontianak, tujuan pendiriannya ialah untuk meningkatkan marwah kesultanan Melayu sepeninggal Sultan Hamid II.

Selanjutnya, Majelis Adat Budaya Melayu (MABM) ini didirikan pada tahun 1997, yaitu hampir empat tahun setelah MAD didirikan. Isu yang melatarbelakangi berdirinya MABM Kalimantan Barat tahun 1997, salah satunya ialah perlunya perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat Melayu . Selain daripada itu, keberadaan MABM diharapkan dapat mengawal persoalan adat dan budaya sehingga dapat diwariskan kepada generasi muda. Aktivitas menonjol yang dilakukan MABM sejauh ini adalah menggelar festival Budaya Melayu setiap tahun dan membangun Rumah Melayu.

Dari uraian diatas, dapat dikatakan bahwa Orde Baru adalah masa dimana politik identitas Dayak terkonsolidasi. Dengan adanya peminggiran yang sistimatis mereka kemudian

bersatu. Masa Orde Baru juga dapat dikatakan bahwa etnik Melayu kembali menduduki posisi strategis pada pemerintahan dan politik di Kalimantan Barat.

Periode Orde Reformasi/Otonomi Daerah (1998-2008)

Sejak tahun 1998, secara nasional telah terjadi perubahan yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat di Indonesia, mulai dari aspek sosial, ekonomi maupun politik(23). Hal ini diawali oleh krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun tersebut yang kemudian secara sistematis telah berimplikasi kepada pelbagai aspek kehidupan termasuk sistem politik maupun sistem pemerintahan. Bahkan pada beberapa daerah, Krisis tersebut ternyata juga berimplikasi terhadap munculnya pelbagai konflik sosial di beberapa wilayah di Indonesia seperti konflik Ambon, Poso, Sambas maupun Sampit. Sehingga sempat dijadikan hipotesis oleh beberapa peneliti dalam laporannya bahwa konflik yang terjadi dipelbagai wilayah di Indonesia pada masa itu berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan melemahnya kekuasaan militer di pemerintahan dan berubahnya sistem politik di Indonesia. Terlepas dari terbukti atau tidaknya hipotesis tersebut, yang jelas tuntutan yang sangat kuat akan perubahan dari masyarakat telah menyebabkan bergesernya peta politik di tanah air. Salah satu contoh konkrit adalah hasil Pemilu tahun 1999 yang menempatkan PDI-P sebagai pemenang Pemilu, meskipun belum berhasil menempatkan Megawati sebagai Presiden RI.

Sebagaimana diketahui bahwa sejak tahun 1998 sehingga tahun 2008, Negara Indonesia mengalami dua orde pemerintahan, 1998-2001 dikenali sebagai periode Reformasi, dan sejak 2002-sehingga hari ini dikenali sebagai orde Otonomi Daerah. Tercatat ada 4 orang presiden pada rentang waktu ini. Di Kalimantan Barat pada periode ini dimulai dengan wacana putra daerah sebagai pemimpin daerah. Oleh itu DPRD Propinsi Kalimantan Barat yang berwenang memilih Gubernur dan wakilnya akhirnya memutuskan mengangkat pasangan Usman Jafar (Melayu) dengan LH Kadir (Dayak) sebagai Gubernur dan wakil Gubernur Kalimantan Barat. Usman Ja'far (2003-2008) sebenarnya adalah gubernur pertama yang orang Melayu, sejak provinsi ini diadakan pada 1957.

Masa orde Otonomi daerah ditandai dengan banyaknya didirikan Propinsi dan kabupaten baru di Indonesia. Di Kalimantan Barat yang sebelumnya hanya 7 kabupaten sampai hari ini sudah bertambah menjadi 14 kabupaten. Pendirian sebuah kabupaten baru berdasarkan kepada kebijakan politik untuk memberi peluang kepada penduduk setempat membangun kawasannya. Oleh itu pada setiap kabupaten terdapat etnik dominan. Di Kabupaten Sambas etnik dominannya adalah Melayu Sambas, walaupun begitu di Kecamatan Sajingan Besar etnik dominannya adalah Dayak Selako. Etnik Madura hilang dalam daftar kependudukan kabupaten Sambas, sebenarnya masih ada sekitar segelintir orang Madura di Kabupaten ini, tetapi mereka dicatat sebagai etnik Melayu.

Fenomena Budaya Kekerasan pada Orde Otonomi daerah

Pada tahun 1999, tepatnya pada 17 Januari, menjelang Hari Raya Idul Fitri, terjadi penyerangan yang melibatkan etnik Melayu dan Madura di kampung Parit Setia, Sambas. Konflik tersebut terus membesar dengan lebih 2000 korban terbunuh. Dampaknya masih terasa sehingga hari ini. Etnik Madura tidak dapat kembali lagi ke Sambas. Kejadian tersebut apabila dikaitkan dengan event politik, maka terjadinya pada tahun yang sama dengan Pemilu 1999.

Tahun 2001 kembali lagi konflik etnik Melayu dengan etnik Madura di Pontianak, keadaan tidak meluas tetapi kota Pontianak ketika itu mencekam, karena terjadi blokade kendaraan dibanyak jalan di kota Pontianak. Kejadian ini juga terjadi ketika perpolitikan nasional yang penuh intrik dan sangat labil(24).

Tahun 2007 di kota Pontianak terjadi lagi konflik etnik Melayu dengan etnik China . Kejadian konflik tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : Awalnya sebuah acara tahlilan. Ia diadakan satu keluarga Arab-Melayu, di Gang Tujuhbelas No. 4. Pontianak. Kamis 6 Desember 2007, tahlilan diadakan untuk 40 hari meninggalnya Syarifah Usmulyana, “Acara itu seyogyanya akan dilaksanakan *ba'da sholat isya'* mengundang masyarakat sekitar, seluruh keluarga besar, sahabat dan handai tolan,” . Keesokan harinya, Jumat 7 Desember, banyak media Pontianak, termasuk televisi dan harian, menaruh berita ini di halaman satu.

Dampak daripada peristiwa gang 17 adalah pelarangan festival naga di Pontianak. Bahkan pada akhir Januari 2008, Walikota Pontianak Buchary Abdurrahman mengadakan rapat Muspida Kota Pontianak. Tujuannya, membahas ketegangan dari Melayu militan terhadap golongan Tionghoa. Dia mendapat masukan dari kepala polisi, militer, kejaksaan, Badan Intelijen Nasional maupun DPRD Kota Pontianak. Mereka menyarankan kegiatan festival naga, yang biasa dilakukan untuk merayakan tahun baru Imlek maupun Cap Goh Meh, tidak diadakan pada tahun 2008. Peristiwa konflik di Pontianak ini terjadi menjelang Pilkada kota Pontianak, dimana santer terdengar etnik Cina akan maju sebagai calon walikota mengikuti jejak kesuksesan mereka di kota Singkawang.

”Kemarahan” etnik Melayu selanjutnya dapat dilihat pada peristiwa di kota Singkawang November 2008, mereka kembali berkonflik dengan etnik China sebagai protes terhadap pembangunan patung Naga di kota yang mayoritas penduduknya Tionghoa tersebut. Peristiwa ini terjadi berikutan ”pembangkangan” atas walikota Singkawang yang notabene berasal dari etnik Cina. Peristiwa ini juga dapat dipandang sebagai ”warning” menjelang Pemilu 2009. Dari konflik-konflik tersebut menunjukkan indikasi bahwa etnik Melayu saat itu sedang berada dalam ”ancaman secara politik” , sehingga mudah emosi, sebagaimana yang dialami etnik Dayak pada masa Orde Baru dahulu.

SIMPULAN

Di Kalimantan Barat pada umumnya, budaya kekerasan dan politik identitas terus mewarnai

peristiwa politik lokal . Terkait etnik Dayak dan Melayu, sesungguhnya berasal dari garis nenek moyang yang sama. Namun dalam perkembangan selanjutnya kedua etnik ini telah terpisah oleh karena agama. Melayu diidentikkan dengan Islam sementara Dayak diidentikkan dengan Kristen. Mereka kemudian terlibat dalam persaingan politik yang tajam . Persaingan dalam hal kultural dan ekonomi tidak begitu kuat, bahkan dalam hal kultural telah terjalin banyak sekali kerjasama.

Pada bagian lain, penguatan politik identitas juga tidak dapat dilepaskan dari adanya peran institusi-institusi etnisitas. Institusi seperti MAD dan MABM telah menimbulkan rasa kebanggaan etnik. Kadangkala rasa bangga tersebut berlebihan dan bahkan mengarah militansi etnik (etnosentrisme). Kebetulan pula lembaga-lembaga tersebut berdiri sebelum terjadinya kerusuhan etnik bersekala besar dan masif. Oleh karena itu jangan heran apabila kemudian dikaitkan dengan konsolidasi etnis . Pelbagai pihak kemudian melihat institusi-institusi etnisitas sangat memperkuat Politik Identitas etnik di Kalimantan Barat.

Politik identitas yang secara normal terjadi, mendapatkan peluang yang besar ketika sistem kenegaraan menyediakan ruang untuk itu. Perubahan format Politik setelah rezim Orde baru berupa diadakannya pemilihan kepala daerah secara langsung dan pendirian partai politik yang dipermudah semakin mendukung politik identitas berkembang. saat ini politik Identitas sedang menguat di Kalimantan Barat. Hal ini boleh dilihat pada “pertarungan” penentuan jabatan-jabatan

strategis di pemerintahan. Bagaimanapun politik identitas mesti disadari juga keburukannya. Apabila keadaan ini tidak dikelola dengan baik maka ini membahayakan propinsi Kalimantan Barat dan bahkan negara Indonesia secara keseluruhan.

Selain akibat dinamika politik lokal , intervensi globalisasi juga turut memperkuat politik Identitas. Faktor ini tidak boleh dinisbikan perannya, terutama karena globalisasi menyediakan ruang keterbukaan untuk saling berkomunikasi bagi tiga pihak yaitu komunitas global, nation state, dan penduduk lokal. Dalam situasi sekarang dimana sedang terjadi arena persaingan antar ideologi dengan pelbagai warna juga soal ekonomi dipelbagai aras, maka konstruksi identitas tidak kosong dari pengaruh satu sama lain. Terkait dengan soal ini, maka politik identitas berbasis agama dalam masyarakat, juga dapat dipahami sebagai konsekuensi dari persaingan di ranah global. Kehadirannya juga banyak disokong oleh posisi negara yang sedang lemah, baik dalam politik maupun ekonomi.

Terkait dengan keburukan politik identitas ini, nampak bahwa metode kerusuhan etnik telah menjadi kecendrungan sesebuah etnik untuk menunjukkan kekuatan mereka dalam hal politik di Kalimantan Barat sehingga kini. Tindak kriminal yang dilakukan oleh etnik “ancaman” (misalnya : Cina/Madura) terhadap etnik”yang terancam” (misalnya Melayu/Dayak), yang terjadi sebelum maupun setelah event politik seperti : Pemilu, pemilihan bupati, dan pemilihan gubernur bisa berkembang menjadi kerusuhan etnik.

Keadaan ini tampak jelas pada saat ini, dimana konflik antara etnik Melayu dengan etnik Cina, terjadinya menjelang atau sesudah peristiwa politik.

DAFTAR PUSTAKA

Alfath ED. (2015) Potential Conflict between the Malay and the Dayak Ethnic Groups in the Hinterland Region of West Kalimantan. *Makara Hubs-Asia*.;19(191):52–62.

Alfarabi M, Suardi W, Qodir Z. (2020) Ethnic Identity and Local Politics: Study on Regional Head Election in Merauke Regency. *J Gov Civ Soc*. 2021;5(2).

Arif M. AWAL KEHIDUPAN MASYARAKAT TRANSMIGRASI DI RASAU JAYA 1. MASA *J Hist*. 2019;1(2).

Citrano CC. (2019) Perjanjian Tumbang Anoi 1894 Sebagai Sumber Hukum Pidana Adat Dayak Ngaju. *Tampung Penyang*;

Farida I. (2010) Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif. *J Sains dan Inov*;

Hasanuddin H. (2016) POLITIK DAN PERDAGANGAN KOLONIAL BELANDA DI PONTIANAK. *Patanjala J Penelit Sej dan Budaya* 8(2).

Idham I, Amin Pranowo S. (2020) PILKADA, POLITIK IDENTITAS DAN KEKERASAN BUDAYA. *J Renaiss*. 2020;5(2).

Kristianus. (2011) Nasionalisme etnik di kalimantan barat. *J Masyarakat Indones*. 2011;

Kristianus K. (2016) Politik dan Strategi Budaya Etnik dalam Pilkada Serentak di Kalimantan Barat. *Polit Indones Indones Polit Sci Rev*.;

Kristianus Atok. (2017) Dialektika Budaya Dayak: Inkulturasi Agama Katolik dengan Budaya Dayak Kayaan. *Juli J Stud Kult [Internet];II(22):85–91*. Available from: www.an1image.org%5Cnwww.an1image.org

Kristianus K. (2017) The Development of Multicultural Education Model in West Kalimantan. *JETL (Journal Educ Teach Learn*;

Melfianora. (2019) Penulisan Karya Tulis Ilmiah dengan Studi Literatur. *Open Sci Framew*;

Mamoto RS. Gerry van Klinken.(2019) Perang kota kecil: kekerasan komunal dan demokratisasi di Indonesia. Translated by Bernard Hidayat. Jakarta:

KITLV-Jakarta dan Yayasan Obor Indonesia, 2007, xxii + 287 pp. [Originally published as *Communal violence and democratization i. Wacana, J Humanit Indones*. 2009;11(2).

Prasojo ZH. (2017) Social change and the contributions of the tionghoa, dayak and melayu (tidayu) in west kalimantan. In: *Asia in Transition*. 2017.

Prabowo R. (2020) EKSISTENSI PARTAI PERSATUAN DAYAK PADA PEMILU 1955. *SWADESI J Pendidik dan Ilmu Sej*. 2020;1(1).

Purmintasari YD. (2015) PERISTIWA PEMBERANTASAN PGRS-PARAKU DI KALIMANTAN BARAT TAHUN 1967 (KAJIAN TEORI HEGEMONI GRAMSCI UNTUK PEMBELAJARAN SEJARAH LOKAL). *Istor J Pendidik dan Ilmu Sej*.

Sugiyono. (2010) *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung Alf;

Suparno. (2018) *Pemilihan Kepala Daerah Langsung Kelebihan dan Kekurangannya*. Mimb Adm FISIP UNTAG Semarang.

Sutianti S. (2020) *Dinamka Konflik Antar Etnis Dayak dan Etnis Madura di Samalantan Kalimantan Barat*. ijd-demos.

Suparlan P. (2014) *Kesukubangsaan dan Primordialitas: Program Ayam di Desa Mwapi, Timika, Irian Jaya*. Antropol Indones.

Suparlan P. (2014) *Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural*. Antropol Indones;

Yusriadi Y-. (2019) *IDENTITAS DAYAK DAN MELAYU DI KALIMANTAN BARAT*. *Handep J Sej dan Budaya*;